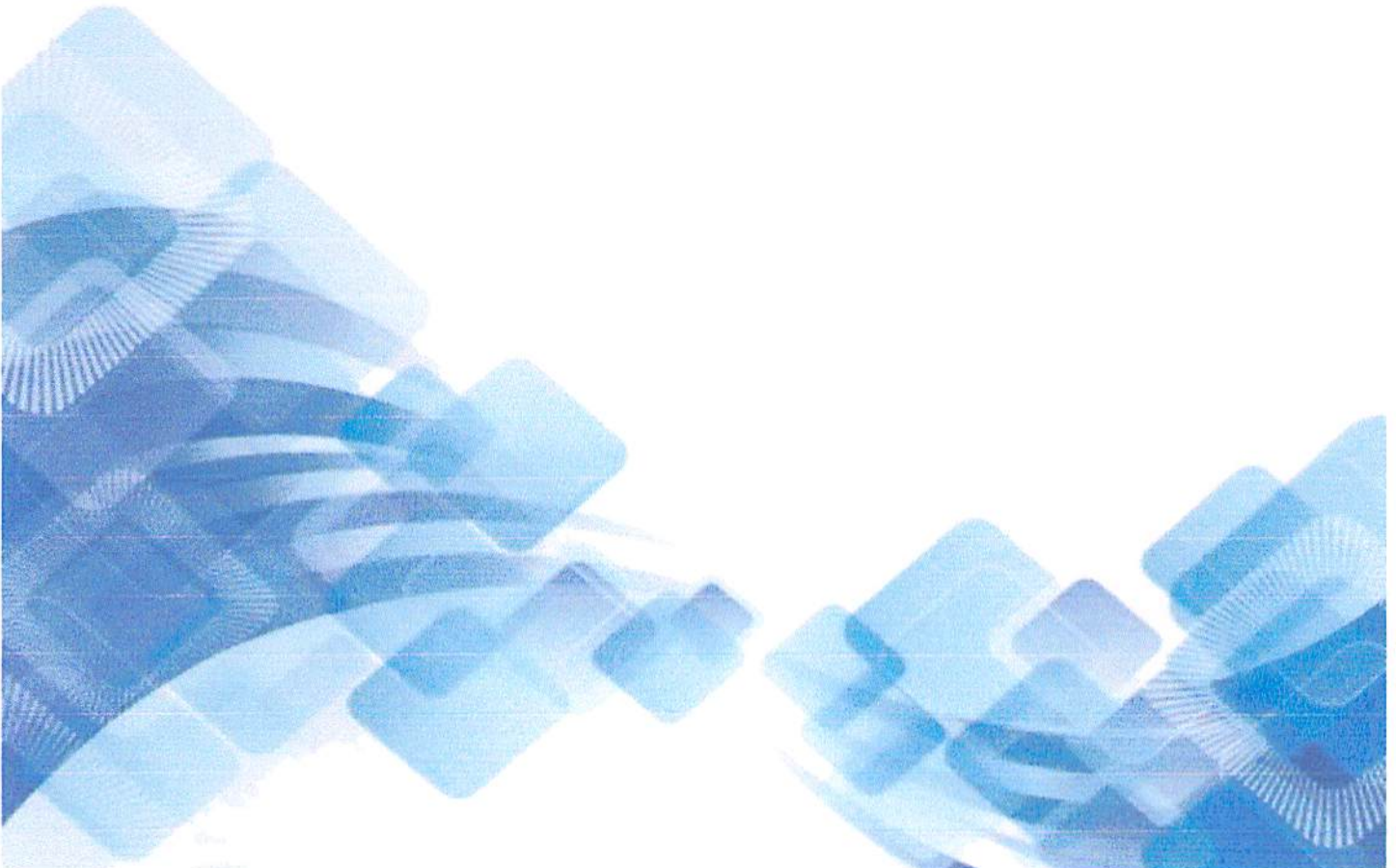




**RENCANA AKSI  
ATAS PERJANJIAN KINERJA  
TAHUNAN  
PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA  
TAHUN 2020**





BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
Jl. Parantritis KM 5,5 Sewon Yogyakarta – telepon : (0274) 385323; 445271  
Faksimile : (0274) 415984 – E-mail : [yogya@bpkp.go.id](mailto:yogya@bpkp.go.id)

## RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2020

Dalam memastikan terwujudnya target kinerja yang telah diperjanjikan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor S-2059/PW12/6/2020 tanggal 4 September 2020, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyusun rencana aksi kinerja sebagai salah satu sarana pengendalian dalam mencapai tujuan organisasi.

Rencana Aksi Kinerja akan dipedomani oleh seluruh pegawai sebagai:

1. Media untuk membangun komitmen dalam mencapai kinerja yang diharapkan dan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pegawai;
2. Arah kebijakan dan strategi bersama dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja serta sebagai dasar kolaborasi pelaksanaan kegiatan dan sinergi dengan mitra kerja;
3. Sarana untuk monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja.

Rencana aksi telah memperhatikan pencapaian target kinerja pelaksanaan beberapa kegiatan yang membutuhkan keterlibatan banyak pihak dan risiko dari setiap kegiatan utama sehingga diharapkan tidak mengganggu pencapaian target kinerja masing-masing yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Yogyakarta, 4 September 2020  
Kepala Perwakilan,

Slamet Tulus Wahyana  
NIP-

**RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2020  
PERWAKILAN BPKP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2020	TARGET KINERJA				No.	KEGIATAN UTAMA		RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO)		ANGGARAN	PIC	SATUAN	TW1	TW2	TW3	TW4
					TW1	TW2	TW3	TW4		Nama Tema	Jml PP/ Keg	PERNYATAAN	NILAI							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
<b>BIDANG IPP</b>																				
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/ Daerah	Nilai optimalisasi penerimaan negara yang terrealisasi	Rp	0	0	0	0	0	1	Pengawasan atas Revlu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional Pemerataan Ekonomi (TORA dan Sertifikasi Lahan)	4	a. Penugasan yang telah direncanakan dalam PKPT tidak dapat terlaksana antara lain karena adanya pemotongan anggaran  b. Pengawasan tidak dapat menemukan kendala dalam pelaksanaan proyek strategis  c. Pengawasan tidak dilaksanakan sesuai pedoman/standar  d. Pelaksanaan pengawasan kurang optimal karena adanya pembatasan fisik maupun sosial	8  9  8  12	10.460.750	IPP	Laporan	1	1	1	1
2		Potensi penerimaan negara yang dioptimisasi	Rp	0	0	0	0	0	2	Pengawasan Lintas Sektoral atas Program Prioritas (PP) Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Rili dan Industrialisasi.	2	Penugasan yang telah direncanakan dalam PKPT tidak dapat terlaksana antara lain karena adanya pemotongan anggaran	8	5.230.375	IPP	Laporan	0	0	2	0
										Pengawasan atas Proyek Strategis Nasional Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Jalan Tol, Non Tol, Bendungan dan Perumahan)	6	Pengawasan tidak dapat menemukan kendala dalam pelaksanaan proyek strategis	9	78.663.000	IPP	Laporan	2	1	1	2
										Pengawasan atas Revlu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional pada Kementerian Perhubungan (Kereta Api, Pelabuhan, Bandara)	2	Pengawasan tidak dilaksanakan sesuai pedoman/standar	8	5.230.375	IPP	Laporan	1	0	0	1
										Pengawasan atas Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional Sektor Perhubungan (Jalur Kereta Api dan Pelabuhan)	3	Pelaksanaan pengawasan kurang optimal karena adanya pembatasan fisik maupun sosial	12	7.845.563	IPP	Laporan	1	1	1	0
3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	Jumlah PP yang tercapai sesuai target	PP						1	COVID-19 - Pengawasan Alat Kesehatan sesuai Perintah Presiden untuk Percepatan Penanganan Covid - 19	1	a. Pelaksanaan pengawasan kurang optimal karena adanya pembatasan fisik maupun sosial	12	254.123.333	IPP	Laporan	0	1	0	0
									2	COVID-19 - Pengawasan Bantuan Sosial sesuai Perintah Presiden untuk Percepatan Penanganan Covid - 19	2	b. munculnya resistensi dari pemerintah daerah atau K/L atas keterlibatan BPKP dalam pengawasan atas penanganan Covid-19	4	254.123.333	IPP	Laporan	0	2	0	0

**RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2020**  
**PERWAKILAN BPKP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2020	TARGET KINERJA				No.	KEGIATAN UTAMA		RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO)		ANGGARAN	PIC	SATUAN	TW1	TW2	TW3	TW4
					TW1	TW2	TW3	TW4		Name Tema	Jml PP/ Keg	PERNYATAAN	NILAI							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
									3	Pengawasan terhadap Penanggulangan dan Penanganan Covid-19 Bidang Jaring Pengaman Sosial pada Intervensi Program padat karya tunai desa & penyaluran barasos menggunakan dana desa berupa Evaluasi atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa	1	c. Tumpang tindih pelaksanaan pengawasan dengan APIP Pemda maupun K/L	4	254.123.333	IPP	Laporan	0	0	0	1
									4	Pengawasan atas Program/ Proyek yang dibiayai oleh Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri	17	d. Pengawasan tidak dilaksanakan sesuai pedoman/standar	8	54.506.313	IPP	Laporan	8	7	2	0
									5	Pengawasan Lintas Sektor/ Peningkatan Konektivitas Multimode dan Antarmode mendukung Pertumbuhan Ekonomi	1	e. Pengawasan yang telah direncanakan dalam PIKPT tidak dapat terlaksana antara lain karena adanya pemotongan anggaran	8	13.110.500	IPP	Laporan	0	0	1	0
									6	Pengawasan atas Akuntabilitas dan Tata Kelola Pelaksanaan Program Prioritas Peningkatan Ketersediaan Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan	1	f. Pelaksanaan pembinaan kurang optimal karena keterbatasan kompetensi tim pembina maupun kurangnya komitmen dari K/L ybs	9	13.110.500	IPP	Laporan	0	1	0	0
									7	Pengawasan atas Akuntabilitas dan Tata Kelola Pelaksanaan Program Prioritas Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan	1	Pelaksanaan pengawasan kurang optimal karena adanya pembatasan fisik maupun sosial	12	2.615.187	IPP	Laporan	0	1	0	0
									8	Pengawasan Lintas Sektor/ atas Program Prioritas Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas dan Pengembangan Iptek-Inovasi	1	Pengawasan tidak dilaksanakan sesuai pedoman/standar	8	2.744.750	IPP	Laporan	0	0	1	0
									9	Dukung Pengawasan Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran	1	Pelaksanaan pengawasan kurang optimal karena adanya pembatasan fisik maupun sosial	12	1.823.143	IPP	Laporan	1	0	0	0
									10	Pengawasan Lintas Sektor/ atas Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran (Verifikasi) DU Program Keluarga Harapan dan Evolusi Program Keluarga Harapan	1	Pengawasan tidak dilaksanakan sesuai pedoman/standar	8	2.744.750	IPP	Laporan	1	0	0	0
									11	Pengawasan Proyek Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha	1	Pelaksanaan pengawasan kurang optimal karena adanya pembatasan fisik maupun sosial	12	2.744.750	IPP	Laporan	1	0	0	0
									12	Pengawasan Sinergi dengan Kantor Staf Presiden terhadap Prioritas Pembangunan	1	Pelaksanaan pengawasan kurang optimal karena adanya pembatasan fisik maupun sosial	12	2.744.750	IPP	Laporan	1	0	0	0

**RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2020**  
**PERWAKILAN BPKP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2020	TARGET KINERJA				No.	KEGIATAN UTAMA		RSIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO)		ANGGARAN	PIC	SATUAN	TW1	TW2	TW3	TW4
					TW1	TW2	TW3	TW4		Nama Tema	Jml PP/ Keg	PERNYATAAN	NILAI							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
									13	Pengawasan atas Kegiatan Prioritas Nasional Pantauan KSP	2	Pelaksanaan pengawasan kurang optimal karena adanya pembatasan fisik maupun sosial	12	5.489.500	IPP	Laporan	2	0	0	0
									14	Pengawasan atas Kinerja Program Infrastruktur dan Ekonomi Wilayah (PISEW)	2	Pengawasan tidak dilaksanakan sesuai pedoman/standar	8	2.615.188	IPP	Laporan	0	0	2	0
									15	Pengawasan dalam rangka Pengawasan Proyek Strategis Nasional	4	Pelaksanaan pengawasan kurang optimal karena adanya pembatasan fisik maupun sosial	12	1.823.143	IPP	Laporan	0	2	0	2
									16	Pengawasan Lintas Sektor Program Prioritas atas Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	1	Pengawasan tidak dilaksanakan sesuai pedoman/standar	8	1.975.000	IPP	Laporan	0	0	1	0
									17	Pengawasan Lintas Sektor atas Program Prioritas Nasional Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja	1	Pengawasan tidak dilaksanakan sesuai pedoman/standar	8	2.744.750	IPP	Laporan	0	0	1	0
									18	Dukungan Pengawasan atas Penerapan Kebijakan WBK/WBBM, SAKIP, dan Integritas ASN	1	Pelaksanaan pengawasan kurang optimal karena adanya pembatasan fisik maupun sosial	12	1.823.143	IPP	Laporan	0	0	1	0
									19	Pengawasan atas Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi	1	Pelaksanaan pengawasan kurang optimal karena adanya pembatasan fisik maupun sosial	12	1.823.143	IPP	Laporan	0	0	1	0
									20	Pengawasan Atas Program prioritas Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi	1	munculnya resistensi dari pemerintah daerah atau K/L atas keterlibatan BPKP dalam kegiatan pengawasan	4	1.823.143	IPP	Laporan	0	1	0	0
									21	Pengawasan atas Hasil Pengadaan Aparatur Sipil Negara	3	Pengawasan yang telah direncanakan dalam PKPT tidak dapat terlaksana antara lain karena adanya pemotongan anggaran	8	5.925.000	IPP	Laporan	3	0	0	0
									22	Pengawasan Lintas Sektor Program Prioritas atas Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan	2	Pengawasan tidak dilaksanakan sesuai pedoman/standar	8	3.646.286	IPP	Laporan	0	2	0	0
									23	Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga Bidang Politik dan Penegakan Hukum	1	Pelaksanaan pembinaan kurang optimal karena keterbatasan kompetensi tim pembina maupun kurangnya komitmen dari K/L ybs	9	21.804.000	IPP	Laporan	0	1	0	0

**RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2020**  
**PERWAKILAN BPKP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2020	TARGET KINERJA				No.	KEGIATAN UTAMA		RESIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO)		ANGGARAN	PIC	SATUAN	TW1	TW2	TW3	TW4												
					TW1	TW2	TW3	TW4		Nama Tema	Jml PP/ Keg	PERNYATAAN	NILAI																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19														
<b>BIDANG APD</b>																																
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Manarah	Nilai optimalisasi penemuan daerah yang teridentifikasi	Rp (Juta)	234	0	0	0	234	1	Pengawasan Pemerintahan Daerah	1	Pelaksanaan audit kurang memenuhi pedoman audit	8	7.200.000	Korwas APD	Laporan	0	0	0	1												
		Polisi penemuan daerah yang dioptimalkan	Rp (Juta)	468	0	0	0	468																								
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	Jumlah KP yang selesai	KP	7	0	0	0	7	1	PNSP3KPOS - Pengawasan atas Kegiatan Prioritas Penataan Dlaya Politik	1	Pelaksanaan audit kurang memenuhi pedoman audit	8	14.545.500	Korwas APD	Laporan	0	0	0	1												
		Jumlah KP yang tercapai sesuai target	KP	7	0	0	0	7																								
		Jumlah KP yang tercapai sesuai target	KP	7	0	0	0	7													2	Pengawasan Kebijakan Fiskal/Dana Transfer	1	Pelaksanaan audit kurang memenuhi pedoman audit	8	12.500.000	Korwas APD	Laporan	0	0	0	1
			Jumlah KP yang tercapai sesuai target	KP	7	0	0	0													7	3	PN1 PPJ KP 5 & 6 : Pengawasan atas Program Prioritas Perlindungan Sosial dan Administrasi Kependudukan terkait Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan dan Integral Sistem Administrasi Kependudukan	1	Pelaksanaan audit kurang memenuhi pedoman audit	6	15.715.000	Korwas APD	Laporan	0	0	0
Jumlah KP yang tercapai sesuai target	KP	7		0	0	0	7	4	PND1.PP01.PR.01.04 Evaluasi Program Prioritas Nasional Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan terkait Pendampingan pada Proses Perencanaan dan Pelaporan Pembangunan Desa	1	Pelaksanaan audit kurang memenuhi pedoman audit	8	14.545.500	Korwas APD	Laporan	0	0	0	1													
	3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/LP/BU	Jumlah APIP Pemda dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3	APIP	12				12	5	Pembinaan Peningkatan Kapabilitas APIP pada Kemendagri, Kemendes PDTT, BNPP, dan Pemda	13	Substansi Infrastruktur tidak sesuai dengan ketentuan IACM	9	25.801.000	Korwas P3A	Laporan	4	2	3	4											
Jumlah Pemda dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3			Pemda	12				12	6	Peningkatan Kapabilitas APIP melalui Pembinaan JFA	2	Tidak semua ketentuan ke JFA nan tersampaikan	0	22.749.000,00	Korwas P3A	Laporan	2	0	0	0												
Jumlah Pemda Provinsi dengan MRI ≥ Level 3			Pemda	1				1	7	Peningkatan Kapabilitas APIP melalui Peningkatan Kualitas Penerapan JFA	2	Tidak semua SDM APIP mengerti ketentuan ke JFA nan	9	22.749.000,00	Korwas P3A	Laporan	1	0	0	1												
Jumlah Pemda Kabupaten dengan MRI ≥ Level 3			Pemda	2				2	1	Pembinaan SPIP dan Asistensi Manajemen Risiko pada Kemendagri, Kemendes PDTT, BNPP, dan Pemda	5	Kualitas asistensi/ bimtek kurang optimal	12	11.464.000	Korwas APD	Laporan	0	1	2	2												
Jumlah Pemda Provinsi dengan MRI ≥ Level 3			Pemda	1				1	1	Asistensi Manajemen Risiko	4	Kualitas asistensi/ bimtek kurang optimal	12	26.191.000	Korwas APD	Laporan	0	0	2	2												
Jumlah Pemda Kabupaten dengan MRI ≥ Level 3			Pemda	2				2	1	Pengembangan dan Implementasi Aplikasi SIMDA Next Generation (Next-G)	3	Kualitas asistensi/ bimtek kurang optimal	12	22.500.000	Korwas APD	Laporan	1	0	2	0												
Persentase jumlah pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah			%	1,11	0	0	0	1,11	2	Peningkatan Kualitas Bimtek Riviu LKPD	1	Kualitas asistensi/ bimtek kurang optimal	12	7.200.000	Korwas APD	Laporan	1	0	0	0												
									3	Peningkatan kualitas pengelolaan anggaran Pemda	2	Kualitas asistensi/ bimtek kurang optimal	12	14.500.000	Korwas APD	Laporan	0	0	2	0												

**RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2020**  
**PERWAKILAN BPKP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2020	TARGET KINERJA				No.	KEGIATAN UTAMA		RSIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO)		ANGGARAN	PIC	SATUAN	TW1	TW2	TW3	TW4
					TW1	TW2	TW3	TW4		Name Tema	Jml PP/ Keg	PERNYATAAN	NILAI							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		Terdapatnya Rekomendasi Strategi (Policy Brief ) kepada Provinsi/Kabupaten/Kota	RS	1				1	4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota	1	Kualitas asistensi/ bimtek kurang optimal	12	5.500.000	Korwas APD	Laporan	0	0	0	1
									1	Pengawasan terhadap Penanggulangan dan Penanganan Covid-19 Bidang Jaring Pengaman Sosial pada Intervensi Program padat karya tunai desa & penyaluran bansos menggunakan dana desa berupa Evaluasi etas Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa	4	Pelaksanaan audit kurang memenuhi pedoman audit	8	167.520.000	Korwas APD	Laporan	0	0	0	4
									2	Pengawasan terhadap penanggulangan dan Penanganan Covid-19 Bidang Kesehatan pada Intervensi Pengadaan Alat Kesehatan berupa Pendampingan Pengawasan APIP Daerah atas PBJ penanganan Covid-19	2	Pelaksanaan audit kurang memenuhi pedoman audit	8	18.228.000	Korwas APD	Laporan	0	0	2	0
									3	Pengawasan terhadap penanggulangan dan penanganan Covid-19 Bidang Dukungan Industri untuk Pemulihan Ekonomi pada Intervensi upaya pemulihan ekonomi nasional pada pemerintah daerah	2	Pelaksanaan audit kurang memenuhi pedoman audit	8	42.980.000	Korwas APD	Laporan	0	0	2	0
									4	Pengawasan terhadap penanggulangan dan penanganan Covid-19 Bidang Jaring Pengaman Sosial pada Intervensi pengelolaan bantuan sosial bersumber dana APBD	2	Pelaksanaan audit kurang memenuhi pedoman audit	8	28.938.000	Korwas APD	Laporan	0	0	2	0
									5	Pengawasan terhadap penanggulangan dan Penanganan Covid19 atas upaya pendanaan penanggulangan COVID19	2	Pelaksanaan audit kurang memenuhi pedoman audit	8	18.228.000	Korwas APD	Laporan	0	0	2	0
									6	Pengawasan terhadap Penanggulangan dan Penanganan Covid-19 Bidang Jaring Pengaman Sosial pada Intervensi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai berupa Workshop Hasil Evaluasi Pemanfaatan Dana Desa untuk Penanganan Covid-19	1	Kualitas asistensi/ bimtek kurang optimal	12	84.947.000	Korwas APD	Laporan	0	0	1	0
		Persentase Jumlah desa yang Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa	%	45,01	0	0	0	45,01	1	Evaluasi atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa	8	Pelaksanaan audit kurang memenuhi pedoman audit	8	63.822.000	Korwas APD	Laporan	4	0	4	0
											9	Risiko Kertas Kerja untuk kegiatan assurance dan consulting tidak								
		Jumlah desa yang menerapkan pengabdian asli desa secara memadai	Desa	0					1	Peningkatan Kualitas APBDesa	1	Kualitas asistensi/ bimtek kurang optimal	12	9.258.000	Korwas APD	Laporan	0	0	1	0
									2	Pengawasan Akuntabilitas Tata Kelola Keuangan Desa	2	Kualitas asistensi/ bimtek kurang optimal	12	14.500.000	Korwas APD	Laporan	0	0	1	1
		Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Sikapskudes	APIP	1				1	1	Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa	2	Kualitas asistensi/ bimtek kurang optimal	12	14.500.000	Korwas APD	Laporan	0	1	1	0

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2020  
PERWAKILAN BPKP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2020	TARGET KINERJA				No.	KEGIATAN UTAMA		RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO)		ANGGARAN	PIC	SATUAN	TW1	TW2	TW3	TW4	
					TW1	TW2	TW3	TW4		Nama Tema	Jml PP/ Keg	PERNYATAAN	NILAI								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
<b>BIDANG AKUNTAN NEGARA</b>																					
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	Jumlah PSN yang tercapai sesuai target	PSN	1				1	5	Pengawasan Terhadap Akuntabilitas dan Tata Kelola Korporasi	2	Pelaksanaan audit kurang memenuhi pedoman audit	8	32.292.142	Bidang AN	Laporan	0	1	0	1	
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	Jumlah BUMN dengan pengabdian korporasinya baik	BUMN	1	-	1	-	-	7	Pengawasan Terhadap Akuntabilitas dan Tata Kelola Korporasi	1	Kualitas Bimtek/pendampingan kurang optimal	12	-	Bidang AN	Laporan	0	1	0	0	
		Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	11	-	-	11	-		Pengawasan atas Peran BUMD Jasa Air dalam Mendukung Perluasan Infrastruktur Desas - Penyediaan Akses Air Minum yang Layak dan Aman	12	Pelaksanaan evaluasi kurang	8	19.921.624	Bidang AN	Laporan	0	0	0	12	
		Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BLUD	1	-	-	-	1		Pengawasan atas Peran BLU dan BLUD dalam Mendukung Program Pemerataan Pelayanan Pendidikan Berkualitas dan Pengembangan Iptek Inovasi	2	Pelaksanaan monitoring kurang	8	27.254.600	Bidang AN	Laporan	0	0	0	2	
											Pengawasan terhadap Penanggulangan dan Penanganan COVID-19 Bidang Kesehatan pada Intervensi Penyaluran Insentif Tenaga Medis Pusat dan Daerah serta Penyaluran Santunan Kematian untuk Tenaga Kesehatan	11	Pelaksanaan reviu kurang	8	349.906.000	Bidang AN	Laporan	0	0	11	0
		Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	BUMDes	12	6	8	10	12		Pengawasan atas Peran BUM Desa dalam Mendukung Pengentasan Kemiskinan dan Penguatan Kewirausahaan dan UMKM	1	Kualitas Bimtek kurang optimal	12	13.627.300	Bidang AN	Laporan	0	0	0	0	1
3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	Jumlah BLUD dengan Kepablitasan Sesuai Pengawasan Intern ≥ Level 3	BLUD							Pengawasan atas Akuntabilitas, Tata Kelola, Kapabilitas SPI, dan SIA BLUD pada BLU dan BLUD	3	Kualitas Bimtek kurang optimal	12	27.689.334	Bidang AN	Laporan	0	0	0	3	



**RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2020**  
**PERWAKILAN BPKP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2020	TARGET KINERJA				No.	KEGIATAN UTAMA		RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO)		ANGGARAN	PIC	SATUAN	TW1	TW2	TW3	TW4
					TW1	TW2	TW3	TW4		Nama Tema	Jml Pp/ Keg	PERNYATAAN	NILAI							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
<b>BIDANG INVESTIGASI</b>																				
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	NBai efisiensi pengeluaran negara dan daerah	Rp (juta)	1.123	0	1.123	0	0	1	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Risiko Korupsi	1	Penugasan Investigasi yang berlanjut-larut	8	3.025.750	Korwas Investigasi	Laporan	0	1	0	0
		NBai penyelamatan keuangan negara dan daerah	Rp (juta)	54.249	0	0	0	54.249	2	Pengawasan keinvestigasian atas indikasi permasalahan tertentu	4	Penugasan Investigasi yang berlanjut-larut	8	12.103.000	Korwas Investigasi	Laporan	0	3	0	1
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	%	75	0	0	0	75	3	Pengawasan keinvestigasian atas penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan	1	Penugasan Investigasi yang berlanjut-larut	8	3.025.750	Korwas Investigasi	Laporan	0	0	0	1
		Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/diindaklanjuti	%	100	100	0	0	0	4	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Risiko Korupsi	1	Penugasan Investigasi yang berlanjut-larut	8	81.585.000	Korwas Investigasi	Laporan	1	0	0	0
		Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/diindaklanjuti	%	70	0	0	70	0	5	Peningkatan Kepedulian K/L/P/K dan Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi	1	Penugasan Investigasi yang berlanjut-larut	8	3.025.750	Korwas Investigasi	Laporan	0	0	1	0
									6	Pengawasan keinvestigasian terkait	1	Penugasan Investigasi yang berlanjut-larut	8	3.025.750	Korwas Investigasi	Laporan	0	0	0	1
										Pengawasan keinvestigasian terkait program prioritas peningkatan konektivitas multi moda dan antar moda mendukung pertumbuhan ekonomi	1	Penugasan Investigasi yang berlanjut-larut	8	7.705.000	Korwas Investigasi	Laporan	0	0	0	1
									7	Peningkatan Kepedulian K/L/P/K dan Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi	1	Penugasan Investigasi yang berlanjut-larut	8	7.705.000	Korwas Investigasi	Laporan	1	0	0	0
<b>BAGIAN TATA USAHA</b>																				
1	Meningkatnya Kualitas Layanan "Ketatausahaan" Unit Kerja	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor	75	0	0	0	75	1	Pendataan RB Unit Kerja	1	Hasil survey tidak sesuai target	16	15.743.000	Kepala Bagian Tata Usaha	Laporan	0	0	0	1
		Persentase Pegawai yang mengikuti peningkatan Kompetensi	%	100	25	50	75	100		Kepatan Peningkatan Pengembangan Kompetensi Pegawai	1	Atasan langsung terlambat mengusulkan auditor untuk mengikuti diklat substansi untuk masing-masing jenjang JF	8	10.000.000	Kasubbag Kepegawaian	Laporan	0	0	0	1
		Persentase administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu	%	100	100	100	100	100		Pemrosesan Kenaikan Pangkat, Penilaian Angka Kredit, Pengusulan KGB	7	Staf kepegawaian kurang teliti dalam pemrosesan layanan SDM	8	45.000.000	Kasubbag Kepegawaian	Laporan	1	2	2	2
		Persentase Penyusunan RKA Tepat Waktu Unit Kerja	%	100	0	0	0	100	2	Penyusunan RKA	1	Input output dari bidang-bidang terlambat	8	16.465.500	Kasubbag Keuangan	Dokumen	0	0	0	1

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2020  
PERWAKILAN BPKP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2020	TARGET KINERJA				No.	KEGIATAN UTAMA		RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO)		ANGGARAN	PIC	SATUAN	TW1	TW2	TW3	TW4
					TW1	TW2	TW3	TW4		Nama Tema	Jml PP/ Keg	PERNYATAAN	NILAI							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		Skor IKPA Unit Kerja	Skor	85	0	0	0	85	3	Penyusunan Laporan Keuangan	12	Rekonsiliasi persediaan terlambat	10	16.465.500	Kasubag Keuangan	Laporan	3	3	3	3
		Persentase SPM yang terbit tepat waktu	%	90	90	90	90	90		Pengusulan SPM ke KPPN	12	Staf keuangan kurang teliti dalam verifikasi SPM	8	16.465.500	Kasubag Keuangan	Dokumen	3	3	3	3
		Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP	Laporan	1	1	0	0	0	4	Penyusunan Laporan Keuangan	1	Staf keuangan kurang teliti dalam posting transaksi keuangan	9	16.465.500	Kasubag Keuangan	Laporan	1	0	0	0
		Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	Nilai	Baik		Baik		Baik	5	Penyusunan Laporan BMN	2	Kurangnya pemahaman aplikasi dari operator	9	773.739.000	Kasubag Umum	Laporan	0	1	0	1
		Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor	80	0	0	0	80	6	Penilaian SAKIP	1	Outcome dan outbut tidak tercapai	8	91.281.000	Kepala Bagian Tata Usaha	Laporan	0	0	0	1
		Maturitas SPIP Unit Kerja	Nilai	Level 3				Level 3	8	Penilaian SPIP	1	Dokumentasi penyelenggaraan SPIP lemah	16	27.742.000	Kepala Bagian Tata Usaha	Laporan	0	0	0	1
		Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja	Skor	70	0	0	0	70	10	Survey Layanan Internal	1	Responden kurang memahami pentingnya pengisian kuisioner kepuasan layanan	6	29.263.583.000	Kepala Bagian TU	Laporan	0	0	0	1
		Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja (Stakeholder)	Skor	70	0	0	0	70	11	Survey Layanan Eksternal	1	Responden yang mengisi tidak memahami layanan BPKP	12	28.862.000	Kepala Bagian Tata Usaha	Laporan	0	0	0	1

Yogyakarta, 4 September 2020  
11.1.1. Kepala Perwakilan

S. M. T. U. W. A. M.  
NIP: